

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA, KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI
INKLUSIF INDONESIA TAHUN 2015-2021**

SKRIPSI



OLEH :

WULAN HANDAYANI

2010011111013

DOSEN PEMBIMBING:

DR. KASMAN KARIMI, SE.,M. SI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Pembangunan*

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN


ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, KEMISKINAN DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA TAHUN 2015-2021

Oleh

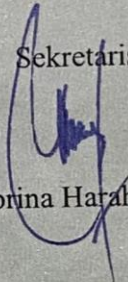
Nama : WULAN HANDAYANI
NPM : 2010011111013

Tim Penguji

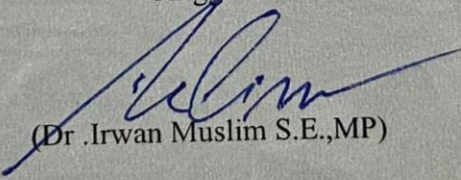
Ketua


(Dr. Kasman Karimi, S.E., M.Si)

Sekretaris



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

Anggota


(Dr. Irwan Muslim S.E., MP)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Pada tanggal 08 Agustus 2024

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bung Hatta
Dekan


(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA,
KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI
INDONESIA TAHUN 2015-2021**

Wulan Handayani¹, Kasman Karimi²

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung
Hatta, Padang, Indonesia

E-Mail: Wulanhade8@gmail.com , kasmankarimi@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di 34 provinsi Indonesia dari tahun 2015-2021. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Eviews 13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan, kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF OPEN UNEMPLOYMENT RATE,
POVERTY AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON INCLUSIVE
ECONOMIC DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA 2015-2021**

Wulan Handayani¹, Kasman Karimi²

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung
Hatta, Padang, Indonesia

E-Mail: Wulanhade8@gmail.com , kasmankarimi@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Open Unemployment Rate, Poverty and Human Development Index towards the Inclusive Economic Development Index in Indonesia in 34 provinces of Indonesia from 2015-2021. The analysis used in this study is panel data regression. The software used to conduct the analysis is Eviews 13. The results of this study indicate that the open unemployment rate has a negative and significant effect, poverty has a negative and insignificant effect and the human development index has a negative and significant effect on the inclusive economic development index in Indonesia

Keywords: *Inclusive Economic Development Index, Open Unemployment Rate, Poverty, Human Development Index (HDI).*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kebaharuan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	13
2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	18
2.2.1 Definisi pengangguran	19
2.2.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif	21
2.3 Kemiskinan.....	21
2.3.1 Definisi Kemiskinan	21
2.3.4 Hubungan Kemiskinan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	23
2.4 Indeks Pembangunan Manusia	24
2.4.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia	24
2.4.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	26
2.5 Penelitian Terdahulu (Mapping).....	27
2.6 Kerangka Pemikiran	34
2.7 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Objek Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Defenisi Operasional Variabel.....	37
3.4.1 Variabel Dependen.....	37
3.4.1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	37

3.4.2 Variabel Independen	38
3.4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	38
3.4.2.2 Kemiskinan	38
3.4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia	38
3.5 Metode Analisis Data	38
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	38
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5.3 Analisis Induktif.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	47
4.1 Keadaan Geografis	47
4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Menurut 34 Provinsi Indonesia Tahun 2015-2021	48
4.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2021	50
4.4 Perkembangan Kemiskinan Menurut 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2021	53
4.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2021	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	58
5.1.1 Hasil Pengujian Normalitas	58
5.1.2 Hasil Pengujian Multikolinieritas	59
5.1.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	60
5.1 Analisis Regresi Panel	62
5.2.1 Analisis Regresi Panel Dengan Common Effect Model	63
5.2.2 Analisis Regresi Panel dengan Fixed Effect Model.....	64
5.2.3 Analisis Regresi Panel dengan Random Effect Model	65
5.3 Pengujian Signifikansi Regresi Data Panel	66
5.3.1 Hasil Pengujian <i>Chow-Test</i>	66
5.3.2 Hasil Pengujian Hausman Test	67
5.3.3 Hasil Pengujian Lagrange Multiplier.....	67
5.3.4 Hasil Model Terpilih	69
5.4 Pembahasan	69
5.5 Pengujian Hipotesis	72
5.5.1 Hasil Pengujian t-Statistik	72

5.5.2 Pengujian F-Statistik.....	73
5.5.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	73
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi inklusif yaitu keinginan mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa). Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja

Pertumbuhan inklusif merupakan salah satu visi dari pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan dalam arti luas mencakup peningkatan produksi, pendapatan, dan distribusi pendapatan/pengeluaran (Suryanarayana, 2013). Oleh sebab itu, pembangunan dan pertumbuhan suatu wilayah dikatakan inklusif apabila pembangunan tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya dapat dirasakan secara merata (Klassen, 2010). Selain peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan ekonomi, pertumbuhan inklusif beriringan dengan meningkatnya kesempatan kerja produktif dan pemerataan penanaman modal (World Bank, 2009). Hal itu menyebabkan indikator pertumbuhan inklusif tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga antara lain tingkat kemiskinan yang rendah, tercapainya pemerataan pendapatan, dan berkurangnya tingkat pengangguran. Selanjutnya agar pertumbuhan tersebut berkelanjutan sampai di masa depan maka pertumbuhan harus menyeluruh di berbagai sektor dan dapat mengikut sertakan sebagai besar angkatan kerja yang ada.

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan oleh akademisi dan praktisi ekonomi pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. (Klassen, 2010) word bank mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang merata dan dapat menciptakan kesetaraan kesepakatan bagi semua orang melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar, konsumsi, serta produksi bagi masyarakat miskin sehingga kondisi hidup lebih baik dapat tercapai. (Kristyanto & Kaluge, 2018) pertumbuhan ekonomi inklusif mendorong setiap individu untuk mengakses pendidikan, kesehatan dan komponen lainnya yang menunjang standar hidup yang lebih baik

Pembangunan ekonomi iklusif merupakan pembangunan dengan tujuan mengadakan akses dan kesempatan yang luas dan merata untuk semua penduduk, mengurangi kesenjangan yang ada antar golongan maupun daerah, serta meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi inklusif harus dilaksanakan agar mengurangi masalah ketimpangan tersebut.

Menurut (Bappenas, 2018) pembangunan ekonomi inklusif didefinisikan sebagai suatu jenis pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan diantara kelompok wilayah. Sementara itu, (Bank Dunia, 2018) mengatakan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan ekonomi bagi semua kelompok masyarakat. Sederhanya, ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh, maka akan menurunkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

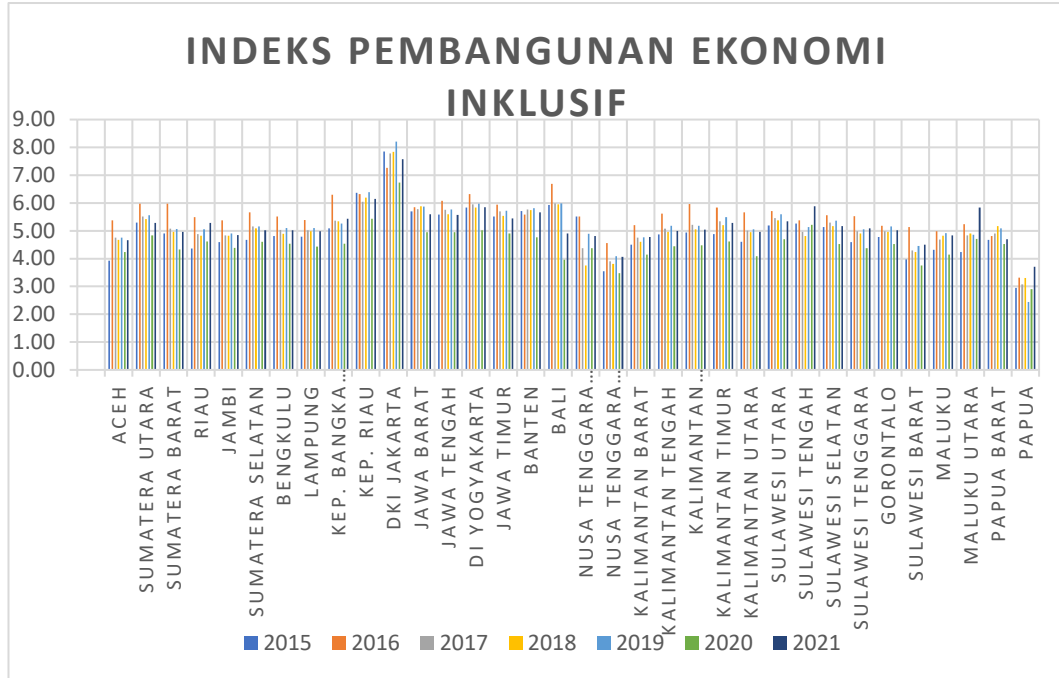
Menurut (Ramos & Ranieri, 2013) pertumbuhan inklusif merupakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan

output sebagai tujuan akhir tetapi lebih mengutamakan pada dampak pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu peningkatan kesempatan kerja dan dapat memaksimalkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (dimensi participation) sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (dimensi benefit sharing). Menurut (UNDP, 2017) pemerintah pun telah menetapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bersifat inklusif sebagai salah satu target pada RPJMN 2015-2019 sekaligus mendukung tercapainya poin kedelapan dalam Sustainable Development Goal's (SDG's) yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang layak bagi semua.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membantu dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional di Indonesia. IPEI terbentuk melalui 3 pilar, 8 sub pilar, dan 21 indikator (Bappenas, 2018). Pertumbuhan inklusif dapat tercapai dengan adanya peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut dikaitkan dengan kebijakan fiskal yaitu dengan mengalokasikan anggaran secara efektif. Secara umum anggaran yang dikeluarkan pemerintah di setiap fungsi berfluktuasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Belanja pemerintah tersebut yaitu belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dilihat dari tabel 1.1 berikut yaitu data yang diperoleh dari Bappenas di ketahui bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif terus mengalami fluktuasi atau perubahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 1.1

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Indeks)



Sumber: Bappenas (Tahun 2015-2021)

Berdasarkan dari data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif diatas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 pada grafik 1.1 menunjukkan dari 34 Provinsi di Indonesia, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang paling tinggi yaitu terletak di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Sedangkan indeks pembangunan ekonomi inklusif terendah terletak di Provinsi Papua pada tahun 2019. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi adalah krisis ekonomi global dan regional yang terjadi dalam periode tersebut. Krisis-krisis ini seringkali berdampak pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas pasar, dan distribusi pendapatan. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh krisis finansial dapat mengganggu investasi dan perdagangan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan indeks pembangunan inklusif. Perubahan kebijakan ekonomi dan sosial juga berkontribusi terhadap

fluktuasi ini. Kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional maupun internasional dapat mendukung atau menghambat pengembangan inklusif. Misalnya, kebijakan yang mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil dapat meningkatkan indeks, sementara kebijakan yang kurang inklusif atau ketidakstabilan politik dapat menurunkan indeks.

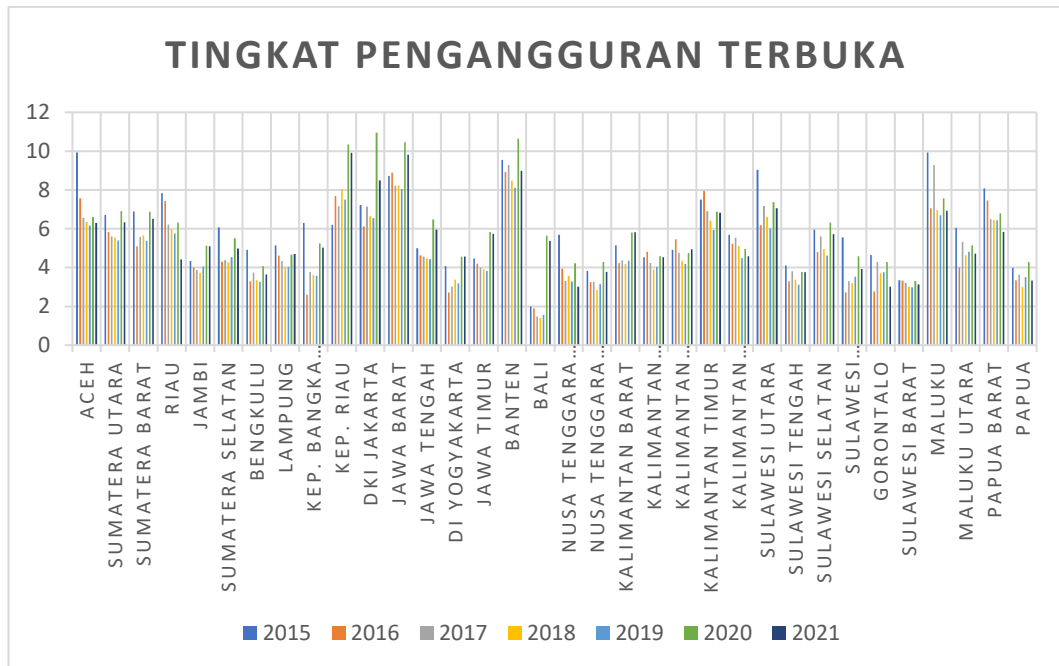
Pandemi COVID-19, yang mulai menyebar pada akhir 2019 dan memuncak pada tahun 2020 dan 2021 pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam, peningkatan pengangguran, dan ketidaksetaraan yang lebih besar. Dampak-dampak ini mempengaruhi indeks pembangunan inklusif karena ketidaksetaraan ekonomi meningkat dan banyak negara mengalami kesulitan dalam memelihara kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga berperan dalam fluktuasi ini. Teknologi yang maju dan proses globalisasi memberikan peluang baru namun juga bisa menyebabkan ketimpangan jika manfaatnya tidak merata. Ketimpangan dalam akses dan manfaat teknologi serta pergeseran dalam ekonomi global dapat mempengaruhi indeks pembangunan inklusif secara signifikan. Selain itu, faktor lingkungan dan perubahan iklim turut mempengaruhi pembangunan inklusif. Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi indeks ini. Ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan lingkungan dapat memperburuk ketidaksetaraan dan mempengaruhi hasil pembangunan inklusif.

Dalam kaitannya dengan pembangunan inklusif, menurut (Sholihah, 2014) pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada, seperti misalnya masalah ketimpangan, kemiskinan, serta kurangnya akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena

sesungguhnya pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya saja, namun juga memperhatikan faktor kesejahteraan masyarakat dari spektrum yang lebih luas.

Grafik 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2021 (Persen)



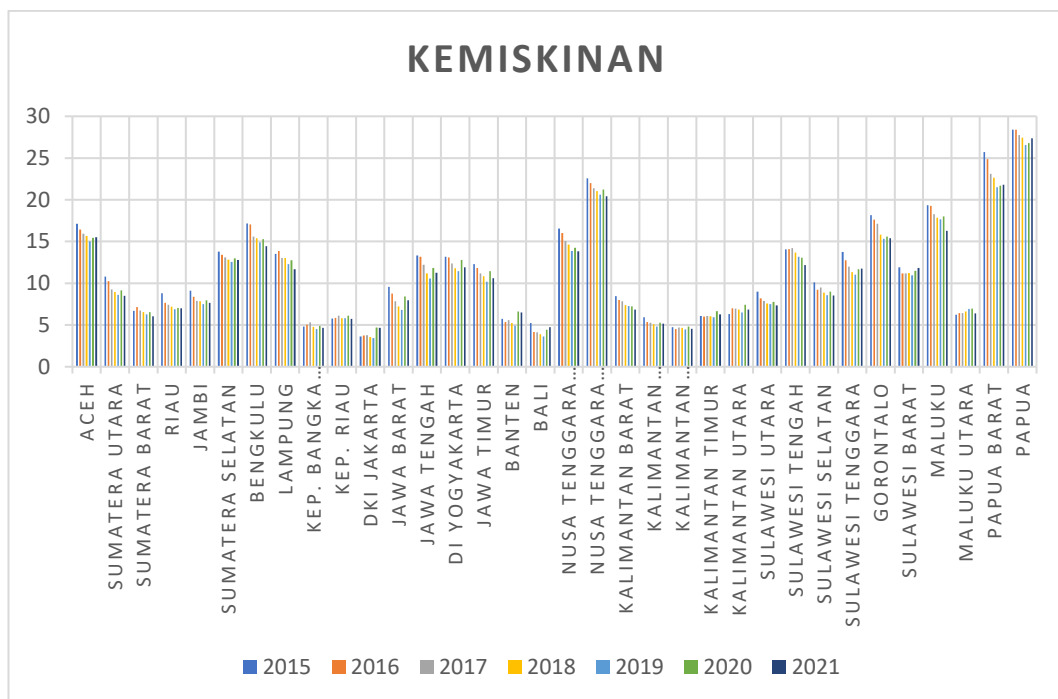
Sumber: Badan Pusat Statistik(Tahun 2015-2021)

Berdasarkan dari data Tingkat Pengangguran Terbuka diatas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015-2021 pada grafik 1.2 menunjukkan dari 34 Provinsi di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi yaitu terletak di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Sedangkan Provinsi Bali menempati tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu pada tahun 2018. Pada indikator yang kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan sebagai salah satu dari indikator sosial yang menggambarkan pencapaian pembangunan suatu wilayah yang dilihat dari sisi ketenagakerjaan. Angka tingkat pengangguran terbuka yang nilainya semakin kecil akan menggambarkan

keberhasilan dalam pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan. Perluasan akses dan kesempatan yang terjadi selama ini nyatanya belum mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama periode 2015-2021. Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk angkatan kerjanya. Hal ini sesuai dengan penelitian Ibnu Hidayat, Sri Mulatsih dan Wiwiek Rindayati (2020) yang berjudul “The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta”. Dilihat dari segi tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini berarti diduga bahwa penyerapan tenaga kerja serta peningkatan akses dan kesempatan yang terjadi di Indonesia selama ini belum optimal, sehingga diperlukan pembenahan kebijakan yang lebih tepat.

Grafik 1.3

Persentase penduduk miskin 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2021 (persen)

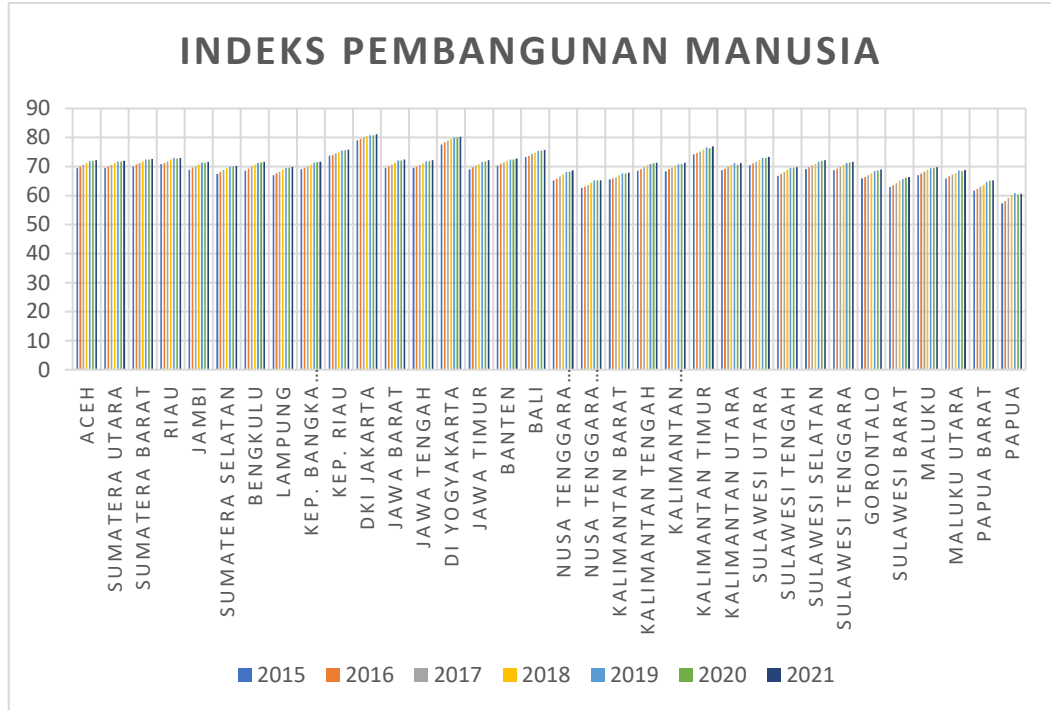


Sumber: Badan Pusat Statistik(Tahun 2015-2021)

Berdasarkan dari data Kemiskinan diatas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 sampai dengan 2021 pada tabel 1.3 menunjukkan dari 34 Provinsi di Indonesia, kemiskinan paling tinggi yaitu terletak di provinsi Papua pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta menempati kemiskinan terendah yaitu pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi masih belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus kearah tindakan kekerasan dan kejahatan. Ini adalah resiko sosial yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk miskin yang tersebar di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Sehingga diperlukannya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan dan pembangunan pada ekonomi harus selaras dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan serta usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan kurang berkembang yang kemudian meningkatkan menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan mereka untuk bekerja dan memiliki akses terbatas kegiatan ekonomi sehingga mereka tertinggal oleh masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Grafik 1.4

Indeks Pembangunan Manusia menurut 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2021 (Indek)



Sumber: Badan Pusat Statistik(Tahun 2015-2021)

Grafik 1.4 diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2015 sampai dengan 2021 dimana indeks pembangunan manusia tertinggi terletak pada Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2021, Sedangkan indeks Pembangunan manusia paling rendah ada pada provinsi Papua pada tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia yang bertumpu pada beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut menyangkut umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. kemudian untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum mampu menurunkan permasalahan tingkat pengangguran, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis kondisi tersebut dengan judul penelitian “ Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia Tahun 2015-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka diajukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2015-2021 ?
2. Seberapa besar pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2015-2021 ?
3. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2015-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2015-2021
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2015-2021
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2015-2021

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah dalam rangka penciptaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

1.5 Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Metode analisis, penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi linear berganda sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel
2. Objek penelitian, penelitian ini diambil dari tahun 2015-2021 dan data diambil dari 34 provinsi di Indonesia, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu provinsi saja.
3. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yaitu definisi setiap variabel.